

PENDIDIKAN BERBASIS MULTIKULTUR: IKHTIAR MEMPERKOKOH ARAS INTEGRASI

Muhammad Alifuddin

Dosen Jurusan Tarbiyah STAIN Sultan Qaimuddin Kendari

Abstrak

Multikulturalisme menunjuk pada suatu kenyataan, bahwa tidak seorompok yang dapat hidup dalam sebuah budaya saja. Dengan demikian, tuntutan terhadap hubungan antar manusia, etnik, budaya dan agama yang dibangun atas dasar kasih, saling percaya dan rasa saling memahami antara satu dan yang lainnya menjadi niscaya. Mengingat prinsip keragaman atau prinsip etnisitas pada masing-masing kelompok, akan mudah menimbulkan percikan-percikan konflik lantaran adanya beberapa perbedaan yang prinsipil dari masing-masing kelompok yang hidup di tengah masyarakat, maka multikulturalisme sejatinya dikemas dalam ranah pendidikan. Pengejawantahan nilai-nilai multikultur melalui jalur pendidikan baik formal maupun informal dipandang efektif mengingat nilai tersebut terkait erat dengan problem sikap dan mental, maka tak ayal lagi pendidikan terlebih khusus pendidikan agama akan menjadi sangat strategis dalam upaya memperkuat aras integrasi di tengah ancaman maraknya gerakan radikalisme. Pemburnian wawasan multikultur lewat jalur pendidikan merupakan iktihar suci untuk melatih dan membangun iman dan logika siswa agar mampu bersikap demokratis, humanis dan pluralis dalam merespon segala keadaan dan situasi yang terjadi lingkungan dimana mereka berinteraksi.

Kata Kunci : Pendidikan, multikultur, integritas

A. Pendahuluan

Indonesia adalah Negara kepulauan yang dicirikan oleh adanya keragaman budaya (multikultur). Keragaman tersebut tampil dalam bentuk suku, ras, bahasa, adat istiadat dan agama. Fakta historis dengan sangat jelas menginformasikan, bahwa genealogi bangsa Indonesia sejak awal pembentukannya hingga kini merupakan bangsa yang jamak. Kejamakan atau pluralitas adalah realitas keindonesian, dan karenanya kejamakan/kemajemukan (pluralitas) adalah bagian tak terpisahkan dengan bangsa ini, dan telah menjadi ciri khas atau identitas keindonesian itu sendiri.

Secara faktual keragaman atau kejamakan budaya, etnik dan agama telah mengantarkan bangsa ini pada pengalaman sejarah yang "manis" dan "pahit". Baik potensi positif maupun negatif dari pluralitas keduanya telah dialami oleh bangsa ini, khususnya yang

berkaitan dengan hubungan antara penganut agama. Pengalaman negatif misalnya dapat dilihat dari berbagai konflik antar etnik dan umat beragama yang kerap terjadi di berbagai daerah. Seperti yang terjadi di Maluku, Maluku Utara, Papua, Poso, Sampit dan sejumlah daerah lainnya. Dalam konteks Sulawesi Tenggara, realitas hidup dalam ruang kejamakan budaya dan etnik, kerap kali juga menyisahkan pengalaman pahit, meskipun belum separah yang terjadi di daerah lainnya seperti, Maluku, Maluku Utara ataupun Poso, untuk kasus lokal Sultra sebut saja misalnya peristiwa konflik antar kelompok di Universitas Haluoleo yang juga menimbulkan korban jiwa dari mereka yang tidak bersalah

Berangkat dari berbagai peristiwa konflik horisontal yang terjadi di beberapa daerah dan wilayah di negeri ini, maka pemerhati pendidikan kini semakin menyadari pentingnya membangun wawasan multikultur dalam iman dan logika anak bangsa. Dengan usaha tersebut diharapkan benih dan peluang konflik seperti yang terjadi sebelumnya dapat teratasi atau diminimalisasi.

B. Membangun Basis Multikultur Lewat Jalur Pendidikan

Keniscayaan untuk hidup dalam dunia plural tidak saja memiliki pijakan histories dari geneologi kehidupan manusia, tetapi juga semakin dikukuhkan dengan adanya globalisasi, yang menjadikan isolasi kehidupan manusia menjadi hilang sebagai gantinya adalah kenyataan, bahwa berbagai macam etnik, budaya dan agama "dipaksa" untuk hidup bersama, dekat atau bahkan hidup dalam satu kamar di dalam sebuah kampung global. Konsekuensinya adalah munculnya tuntutan hubungan antar manusia, etnik budaya dan agama yang lebih bersahaja dan penuh rasa saling memahami antara satu dan yang lainnya.

Hubungan antar umat manusia, khususnya pada masyarakat majemuk selalu diwarnai pasang surut. Baik dalam skala lokal, regional nasional maupun internasional. Meskipun hampir semua doktrin keagamaan dan nilai-nilai kearifan budaya yang hidup dan berkembang serta dianut oleh masyarakat, selalu mengajarkan pentingnya keharmonisan, kedamaian, kerukunan dan saling menghormati, serta menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Namun, realitas kehidupan manusia yang dilingkupi oleh agama dan berbagai kearifan sosial budaya tersebut sering menunjukkan hal yang sebaliknya, yaitu konflik, mulai dari skala yang kecil dan sederhana hingga konflik yang besar.

Menurut Turnomo kekerasan dan pertikaian antara etnik yang terjadi di hampir setiap jalur negeri ini pada prinsipnya ingin menegaskan kembali, bahwa sifat multikultur masyarakat Indonesia merupakan persoalan yang penting untuk dikelola secara serius. Dalam arti perlu adanya penanganan yang sifatnya mendasar. Dalam banyak peristiwa konflik, menjelaskan bahwa penanganan konflik horisontal sebagai konsekuensi dari keragaman masih sebatas mengurai ketegangan. Lebih lanjut Turnomo menyebutkan; bahwa cara penyelesaian seperti ini tidak akan pernah menyelesaikan masalah karena tidak menyentuh akar persoalan yang sebenarnya. Perdamaian yang diupayakan oleh para pengambil kebijakan selama ini cenderung bersifat formalistik.¹

Sejarah konflik menunjukkan, bahwa perbedaan agama dan budaya ternyata merupakan salah satu pemicu sensitif. Padahal fakta empiris menyuguhkan kenyataan, bahwa hampir seluruh kehidupan manusia niscaya berhadapan dengan ranah keragaman, baik agama, budaya, etnik maupun bahasa. Sehingga, jika saja manusia tampil dan bertahan dengan watak primordialnya masing-masing, maka akibat konflik yang pahit terus akan dialami oleh komunitas umat manusia.

Oleh karena itu, salah satu dimensi penting yang niscaya untuk diupayakan oleh seluruh elemen bangsa ini dalam rangka meminimalisasi peluang bagi munculnya ego kultural, etnik maupun agama yang dapat berimplikasi negatif dalam kehidupan sosial masyarakat, adalah dengan cara mengejawantahkan wawasan multikultur dalam ruang iman dan logika anak negeri. Mengingat wawasan multikultur adalah satu paradigma yang bergerak untuk dan dalam rangka memahami dan menerima segenap dari relung-relung perbedaan yang ada pada setiap individu dan kelompok lain, maka jalur pendidikan sebagai *media transfer of knowledge* menjadi sangat penting.

Multikulturalisme menunjuk pada suatu kenyataan, bahwa tidak seorangpun yang dapat hidup dalam sebuah budaya saja. Menurut Suparlan; multikulturalisme adalah sebuah ideologi yang menekankan kesederajatan dan perbedaan kebudayaan.² Pada aras ini

¹Turnomo Raharjo, *Menghargai Perbedaan Kultural*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005)

² Parsudi Suparlan, "Multikulturalisme Sebagai Modal Dasar bagi Aktualisasi Kesejahteraan Rakyat Indonesia", *Makalah Seminar Nasional Menghidupkan dan Memantapkan Multikulturalisme sebagai Modal untuk Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat di Indonesia*, Kerjasama Kementerian Kesejahteraan Rakyat dan UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta 8 September 2004

multikulturalisme menjamin pentingnya saling penghormatan antara berbagai kelompok masyarakat yang memiliki kebudayaan berberda. Penghormatan yang memungkinkan setiap kelompok termasuk kelompok minoritas, untuk mengekspresikan kebudayaan mereka tanpa mengalami prasangka buruk dan permusuhan.³

Apabila kebudayaan itu tidak sederajat, pada gilirannya akan memunculkan *stereotip* dan penuh prasangka yang muncul dalam hubungan antar budaya, dalam kondisi tersebut maka potensi konflik sosial dalam masyarakat cukup besar. Kondisi seperti ini bisa muncul dalam masyarakat majemuk, termasuk Indonesia. Dalam tataran tersebut, pendidikan multikultur menyajikan solusi dengan cara memberikan pengetahuan dan pemahaman antar budaya sesuai perspektif kebudayaan dan keyakinan keagamaan masing-masing yang ada dalam masyarakat dan melalui kebijakan pemerintah yang membuat kesederajatan dalam perbedaan kebudayaan. Dalam multikulturalisme asumsi tentang kelompok subordinat dan dominan tidak ada. Setiap kelompok mempunyai kesempatan yang sama untuk mengekspresikan diri, hidup berdampingan, dan bekerjasama dengan kelompok lain.⁴

Menurut Yakin, multikulturalisme bila tidak dikemas dalam ranah pendidikan dan kesadaran, akan memiliki potensi yang cukup besar bagi terjadinya konflik antar kelompok. Prinsip keragaman atau prinsip etnisitas pada masing-masing kelompok, akan mudah menimbulkan percikan-percikan konflik lantaran adanya beberapa perbedaan yang prinsipil dari masing-masing kelompok yang hidup di tengah masyarakat. Bahkan dalam skala luas, manifestasi dari prinsip-prinsip multikulturalisme bisa merambah hingga perbedaan wilayah geografis, etnis, budaya, bahasa, agama, keyakinan, pola pikir hingga perbedaan kemampuan fisik maupun psikis. Perbedaan-perbedaan tersebut bila tidak dikelola dengan manajemen yang baik, berpeluang untuk memicu ketegangan yang menjadi cikal bakal bagi terciptanya konflik horisontal.⁵

³ Edi Suharto, "Konflik Etnik dan Naluri Nativistik: Potensi dan Hambatan Pengembangan Masyarakat Multikultur", *Makalah*, tidak diterbitkan

⁴ Atho Mudzhar, "(Tantangan) dan Kontribusi Agama dalam Mewujudkan Multikulturalisme di Indonesia" *Makalah*, *Seminar Nasional Menghidupkan dan Memantapkan Multikulturalisme sebagai Modal untuk Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat di Indonesia*, Kerjasama Kementerian Kesejahteraan Rakyat dan UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta 8 September 2004

⁵ M. Ainul Yakin, *Pendidikan Multikultur: Untuk Demokrasi dan Keadilan*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2005), h. v

Andaian atas pentingnya penanaman nilai-nilai multikulturalisme, tidak dapat dilepaskan dengan kenyataan, bahwa masyarakat Indonesia yang multikultur secara demografis maupun sosiologis rentan bagi terjadinya konflik, kondisi ini disebabkan karena secara empiris masyarakatnya terbagi (*devided*) kedalam kelompok-kelompok identitas kultural. Menurut Ting & Toomey, identitas kultural merupakan perasaan (*emotional signivicance*) dari seseorang untuk ikut memiliki (*sense of belonging*) atau berafiliasi dengan kultur tertentu. Masyarakat yang terbagi ke dalam kelompok-kelompok itu kemudian melakukan identifikasi kultural (*cultural identivication*), yaitu kondisi dimana masing-masing orang mempertimbangkan diri mereka sebagai representasi dari sebuah budaya partikular.⁶ Identifikasi ini menurut Rogers & Stainfatt, akan menentukan individu-individu yang masuk kedalam *in group* dan individu-individu yang termasuk *out group*. Bagaimana mereka berperilaku ? sebagian ditentukan oleh apakah mereka termasuk kedalam budaya tertentu atau tidak.⁷

C. Signifikasi Pendidikan Agama Dalam Membangun Wawasan Multikultur

Dalam konteks identitas kultural ini Suparlan menilai, bahwa isu tentang etnis dan etnisitas dalam masyarakat Indonesia yang majemuk merupakan realitas yang tampak dalam kehidupan sehari-hari. Para anggota kelompok etnis dilahirkan, dididik dan dibesarkan dalam suasana askriptif primordial etnisitas mereka, akibatnya perbedaan antara "*siapa saya*" dan "*siapa anda*" atau "*siapa kami*" dengan "*siapa mereka*" terlihat jelas batas-batasnya. Dalam situasi demikian *stereotip* dan prasangka tumbuh dan berkembang dengan subur.⁸

Problem disintegrasi pada masyarakat yang plural secara alami akan selalu mengemuka dan setiap saat dapat mengancam kesatuan dan integrasi sosial. Oleh karena itu, penguatan terhadap fondasi integrasi tidak saja menjadi tugas pemerintah, tetapi juga oleh seluruh komponen masyarakat. Namun demikian, jalan penguatan terhadap aras integrasi yang pada masa Orde Baru kerap dijalankan dengan

⁶ Ting & Stella Toomey, *Communicating Across Culture*, 1999, h. 30

⁷ Everett M. Rogers & Thomas M. Stainfatt, *Intercultural Communication*, Illionis univ. 1999, h.97

⁸Parsudi Suparlan, "Menuju Masyarakat Indonesia yang Multikultur", dalam *Jurnal Antropologi Indonesia*, Univ. Udayana, 2002

pendekatan keamanan dan cenderung "represif", seyogyanya tidak lagi dijadikan pilihan utama. Tetapi lebih diarahkan pada upaya pembentukan karakter atau tata pikir berbasis multikultur yang tegak di atas prinsip-prinsip moral yang logis dan rasional.

Jalur yang hingga kini dipandang efektif untuk menumbuhkan nilai-nilai multikultur pada jiwa generasi anak bangsa, adalah melalui pendidikan. Dan karena nilai tersebut sangat berkaitan dengan problem sikap dan mental, maka tak ayal lagi pendidikan agama akan menjadi salah satu titik tumpu masalah ini. Media pendidikan agama sebagai sarana pengintegrasian nilai-nilai multikultur dipandang sebagai salah satu pendekatan yang efektif, mengingat filosofi dasar pendidikan Agama bertujuan untuk mengembangkan nilai-nilai luhur dalam diri peserta didik, sehingga tercipta manusia yang beriman dan berakhlak mulia atas dasar nilai-nilai keilmuan.

Beranjak dari realitas problem konflik SARA yang kerap terjadi dan mengancam integrasi, maka tidak berlebihan jika masyarakat berharap banyak dengan peran pendidikan, khususnya pendidikan agama dalam rangka menciptakan generasi bangsa yang lebih berbudaya dan beradab di masa datang. Yaitu generasi yang menghormati keragaman dan menjadikannya sebagai energi positif untuk mendorong kemajuan di segala bidang.

Andaian untuk mengejawantahkan nilai-nilai multikultur melalui media pendidikan berhubungan erat dengan pemahaman para pendidik, terhadap konsep, gagasan dan urgensi multikulturalisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Atas dasar pemikiran tersebut, maka upaya mengkaji dan menelaah respon dan konstruk pemikiran komunitas pendidik menjadi penting untuk dilakukan. Pandangan tersebut bukan tanpa alasan, utamanya bila mengingat, bahwa posisi seorang pendidik adalah subyek yang memberikan muatan nilai terhadap peserta ajar, yang tentunya akan sangat berpengaruh dalam proses pembentukan struktur berpikir peserta ajar.

Pentingnya membangun wacana multikultur dalam tata pikir guru, dosen dan pemerhati pendidikan, berangkat dari asumsi, bahwa apabila komunitas guru atau dosen memiliki wawasan multikultur yang baik, maka kelak mereka tidak hanya mampu untuk membangun kecakapan dan keahlian siswa terhadap mata pelajaran yang diajarkan. Akan tetapi juga mampu untuk mentransformasi nilai-nilai multikultur secara langsung di sekolah kepada peserta didiknya.⁹

⁹Yakin, *Pendidikan, ...*h. 26

Strategi pendidikan multikultur telah lama berkembang di daratan Eropa, Amerika dan Negara-negara maju lainnya. Dalam perkembangannya, kajian multikultur menjadi sebuah studi khusus dengan nama *pendidikan multicultural*, yang pada awalnya bertujuan agar populasi mayoritas dapat bersikap toleran dan rasional terhadap kelompok minoritas. Selain itu studi ini juga bertujuan politis, yaitu sebagai alat control social penguasa terhadap warganya agar kondisi Negara aman dan stabil.¹⁰ Namun, dalam perkembangan lebih lanjut tujuan politis semakin menipis dan bahkan hilang sama sekali. Hal tersebut disebabkan karena substansi pendidikan multikultur adalah demokrasi, humanism dan pluralism, yang anti terhadap control dan tekanan yang membatasi dan menghilangkan kebebasan berekspresi. Dalam tahapan selanjutnya, paradigm pendidikan multikultur menjadi motor dalam menegakkan demokrasi, humanism dan pluralism yang dilakukan melalui sekolah, kampus dan institusi-institusi pendidikan lainnya.¹¹

Pendidikan multikultur semakin menjadi penting dalam konteks keindonesian, terutama bila mengingat semakin berkecambahnya radikalisme di tengah masyarakat. Bergaunnya radikalisme paling tidak dapat dilihat dari munculnya kembali ancaman dan terror, seperti yang masih hangat dalam ingatan bangsa ini, yaitu peristiwa Merriot II, bom buku, dan pemboman serta penghancuran rumah ibadah pada paruh awal bulan Juli 2009 hingga 2011. Peristiwa tersebut dan rangkaian-rangkaian peristiwa sebelumnya sesungguhnya sebagai suatu pertanda yang mengingatkan kepada semua komponen bangsa yang peduli dengan kedamaian, bahwa kualitas pemahaman atas nilai-nilai Agama yang berbasis kebhinekaan belum membumi secara merata.

Dalam konteks masa lalu Negeri ini juga memiliki pengalaman yang amat menyedihkan. Genocide maupun ancaman disintegrasi bangsa telah terjadi sejak zaman, Singosari, Majpahit, Goa, Mataram hingga pada era terkini. Kekerasan terhadap etnik cina, di Makassar dan Sitobondo, konflik Islam Kisten di Maluku dan Poso, perang etnis Madura dan Dayak yang menelan ribuan jiwa, menjadi sejarah kelam dari bangsa ini.

Masyarakat multikultur pada umumnya menghadapi problem dalam magnitude yang tidak pernah dihadapi oleh masyarakat lain. Di

¹⁰ M.Donna Golnik & C.Philip Chinn, *Multicultural Education in A Pluralistic Society*, (US:Prentice Hall, 1998)

¹¹ Yakin, *Pendidikan*, ...h. 26

antara problem dalam mewujudkan masyarakat multikultur adalah berkembangnya paham primordial, baik dalam bingkai agama maupun kesukuan yang berlebihan, yang memandang agama (keyakinan), suku atau etniknyalah yang paling utama. Oleh karena itu, dalam pendidikan multikultur membangun pemahaman yang obyektif mengenai makna atau pengertian etnis dan ras adalah penting, karena hal ini dapat menumbuhkan pemahaman positif guru dan peserta didik (murid dan mahasiswa) terhadap kelompok etnis dan ras lainnya.

Menurut Ritzer, etnis berasal dari kata *ethnos* (Yunani) yang berarti masyarakat. Dengan kata lain, etnis adalah golongan masyarakat yang didefinisikan secara sosial berdasarkan berbagai macam karakteristik budayanya. Karakteristik-karakteristik budaya ini dapat berupa bahasa, agama, asal suku atau asal negara, tata cara hidup sehari-hari, makanan pokok, cara berpakaian atau ciri-ciri budaya lainnya.¹²

Beranjak dari pengertian di atas, maka pengertian etnis terbentuk berdasarkan definisi sosial dan bukan berdasarkan definisi yang terbangun atas latar keturunan atau biologis. Dengan demikian, makna etnis lebih didasarkan pada ciri sosio kultural, seperti bahasa, agama, asal suku, asal negara dan tatacara hidup sehari-hari.¹³ Dalam kenyataannya setiap kelompok manusia memiliki sistem sosiokultur yang berbeda antara satu dan yang lainnya. Sistem tersebut terbangun sebagai akibat respon terhadap keadaan lingkungan alam yang mereka hadapi. Oleh karenanya, keragaman atau pluralitas suku etnis sejatinya tidak membuat umat manusia yang berasal dari etnis yang berbeda harus terpecah apalagi konflik. Meski demikian, fakta historis menyuguhkan kepada umat manusia, betapa perbedaan yang selayaknya diapresiasi sebagai rahmat Tuhan, justru muncul sebagai pemicu konflik.

Pendidikan multikultur sejatinya menjadi bagian tak terpisahkan dalam semua jenjang pendidikan. Oleh karena itu, penanaman nilai-nilai multikultur melalui jalur pendidikan formal idelanya diaplikasikan pada semua jenjang pendidikan dan mata pelajaran dengan cara menggunakan perbedaan-perbedaan kultural yang ada pada siswa seperti; perbedaan etnis, agama, bahasa, gender, kelas sosial, ras kemampuan dan umur agar proses belajar menjadi efektif dan mudah. Pembinaan wawasan multikultur lewat jalur

¹² George Ritzer, et al., *Sociology Experiencing a Changing Society*,

(Boston: Allyn and Bacon, 1991), h. 254

¹³ Yakin, *Pendidikan*.....h. 193

pendidikan formal merupakan ikhtiar suci untuk melatih dan membangun karakter siswa agar mampu bersikap demokratis, humanis dan pluralis dalam merespon segala keadaan dan situasi yang terjadi lingkungan dimana mereka berinteraksi. Oleh karena itu, dalam konteks pendidikan multikultur seperti yang disebut di atas; siswa atau peserta didik diharapkan dapat dengan mudah memahami, menguasai dan mempunyai kompetensi yang baik terhadap mata pelajaran yang diajarkan guru, siswa tidak saja diharapkan mampu mendeskripsikan apa yang dimaksud nilai-nilai multikultur tetapi juga dapat bersikap dan mengejawantahkan nilai-nilai demokratis, humanism dan pluralism di dalam ataupun di luar lingkungan sekolah.

Karena itulah meminjam filsafat pendidikan yang dikembangkan Paolo Frire, bahwa pendidikan difungsikan untuk pembebasan, proses pemerdekaan, bukan penjinakan social budaya (*social and cultural domestication*). Pendidikan bertujuan menggarap realitas manusia, dan karena itu, secara metodologis bertumpu pada prinsip-prinsip aksi dan refleksi total, yaitu prinsip bertindak untuk mengubah kenyataan yang menindas dan pada sisi simultan lainnya secara terus menerus menumbuhkan kesadaran akan realitas dan hasrat untuk mengubah kenyataan yang menindas.

Dengan cara pandang yang demikian, maka menjadi tugas semua komponen bangsa, khususnya yang bergelut dalam dunia pendidikan, untuk sesegera mungkin melakukan pembebasan terhadap pendidikan yang selama ini dilakukan oleh masyarakat dengan memberikan warna yang lebih inklusiv, sehingga pada saat yang bersamaan tampaknya perlu dilakukan dekonstruksi atas muatan pendidikan yang berbasis eksklusiv. Hal ini dilakukan mengingat kegagalan dalam mengembangkan semangat, demokratisasi, humanism dan pluralism sebagai substansi dari multikulturalisme pada gilirannya akan menumbuhkn gerakan-gerakan radikalisme. Sebaliknya keberhasilan dalam menumbuhkan sikap demokratis, humanis dan pluralis akan mendekatkan masyarakat pada situasi social yang aman dan damai jauh dari ancaman teror dan konflik.

D. Penutup

Upaya mengejawantahkan nilai-nilai multikultur melalui sarana dan lembaga pendidikan sebagai salah satu ikhtiar untuk memperkuat aras integrasi dan komitmen NKRI di tengah ancaman disintegrasi, mengandaikan pada perlunya dukungan dan kerja bareng yang apik dan berkesinambungan dari kalangan pemerhati pendidikan.

Dan disisi lain meniscayakan peran serta dan dukungan nyata dari pengambil kebijakan mulai dari tingkat pusat hingga daerah.

Dalam konteks keagamaan, wacana multikulturalisme mengedepankan pentingnya menghormati perbedaan yang muncul dari keragam tafsir teks suci, baik dalam lingkup intern umat beragama lebih-lebih lagi antar agama yang berbeda. Oleh karena itu, multikulturalisme menegasikan (menolak) watak dan sifat *truth claim* (klaim kebenaran) oleh satu pihak. Yang dikedepankan adalah dialog yang dilingkupi oleh rasa salingpengertian dan bersahaja, serta kesiapan memahami kebenaran yang dimiliki oleh pihak lain. Oleh karena itu, penting kiranya untuk mengutip pernyataan Paul F Kitner Kitner tentang pentingnya dialog antar agama dan meniscayakan adanya etika global serta tanggungjawab bersama. Ia menekankan dialog antar masyarakat dan budaya serta mensyaratkan adanya etika global dan tanggungjawab global. Lebih lanjut ia menyatakan, bahwa perdamaian dunia dan keadilan yang lebih besar dapat terwujud bila semua agama secara bersama bisa mengakui secara minimal nilai, norma prinsip dasar dan kesempurnaan yang terdapat dalam semua agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M.Amin, *Studi Agama Normativitas dan Historisitas*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995
- Golnik, Donna & C.Philip Chinn, *Multicultural Education in A Pluralistic Society*, US;Prentice Hall, 1998.
- Kitner, Paul F., *Satu Bumi Banyak Agama: Dialog Multi Agama dan Tanggung Jawab Global*, Jakarta: Gunung Mulia, 2003
- Mudzhar, Atho, "(Tantangan) dan Kontribusi Agama dalam Mewujudkan Multikulturalisme di Indonesia" *Makalah, Seminar Nasional Menghidupkan dan Memantapkan Multikulturalisme sebagai Modal untuk Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat di Indonesia*, Kerjasama Kementerian Kesejahteraan Rakyat dan UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta 8 September ,2004
- Raharjo ,Turnomo. *Menghargai Perbedaan Kultural*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005
- Ritzer, George ,et al., *Sociology Experiencing a Changing Society*, Boston: Allyn and Bacon, 1998
- Everett M. Rogers & Thomas M. Stainfatt, *Intercultural Communication*, Illionis univ. 1999

Suharto, Edi "Konflik Etnik dan Naluri Nativistik: Potensi dan Hambatan Pengembangan Masyarakat Multikultur", *Makalah*, tidak diterbitkan

Suparlan, Parsudi "Multikulturalisme Sebagai Modal Dasar bagi Aktualisasi Kesejahteraan Rakyat Indonesia", *Makalah Seminar Nasional Menghidupkan dan Memantapkan Multikulturalisme sebagai Modal untuk Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat di Indonesia*, Kerjasama Kementerian Kesejahteraan Rakyat dan UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta 8 September 2004

_____, "Menuju Masyarakat Indonesia yang Multikultur", dalam *Jurnal Antropologi Indonesia*, Univ. Udayana, 2002

Ting & Stella Toomey, *Communicating Across Culture*, 1999

Yakin, M.Ainul, *Pendidikan Multikultur: Untuk Demokrasi dan Keadilan*, Yogyakarta: Pilar Media, 2005